

ANALISIS SEKTOR BASIS DI WILAYAH RIAU PESISIR

Fajar Muhamad¹⁾, Wahyu Hamidi²⁾, Yusni Maulida²⁾

1) Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Email : fajarkarani@gmail.com

Analysis Base Sector in Riau Coastal Areas

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the base sector in the economy in the Riau Coast region and determine the sectors that experienced changes and growth in the Riau Coast region in the year using the Location Quertion method and the Shift Share method. This study uses secondary data in the form of time series from the Gross Regional Domestic Product (PDRB) of Regency / City and Riau Province in 2015-2019. This study consists of three variables: Gross Regional Domestic Product, Economic Sector and Leading Sector. The results of the Location Question analysis show that there are sixteen economic sectors which are the basic sectors in the Coastal Riau Region and the mining and quarrying sector, the manufacturing sector, the transportation and warehousing sector and the government administration sector, defense and social security required to be the dominant sector. The results of the Shift Share analysis showed Bengkalis Regency, Rokan Hilir Regency and Kepulauan Meranti Regency to depend on the economy in the primary sector, while Indragiri Hilir Regency, Pelalawan Regency, Siak Regency and Dumai City that the area had the economic structure of the area dominated by the secondary sector.

Keywords: GRDP, Location Question, Shift Share

PENDAHULUAN

Pencapaian keberhasilan pembangunan daerah melalui pembangunan ekonomi harus disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing masing daerah serta diperlukan perencanaan pembangunan yang terkoordinasi antar sektor, perencanaan pembangunan disini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh tentang potensi potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Keterbatasan sumberdaya di suatu daerah baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya finansial maupun sumberdaya lainnya merupakan masalah umum yang

dihadapi oleh sebagian besar daerah untuk dapat menggerakkan seluruh perekonomian yang mampu sebagai penggerak utama untuk memacu laju pembangunan di suatu daerah (BPS Kepri, 2016).

Wilayah pesisir memiliki sumberdaya alam yang sangat kaya dan beragam, selain juga memiliki aksesibilitas yang sangat baik untuk berbagai kegiatan ekonomi, seperti transportasi, industri, permukiman dan pariwisata. Perairan pesisir merupakan wilayah transisi antara daratan dan lautan. Di dalamnya terdapat ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan ikan. Karakteristik sumber

daya manusia yang terlibat di dalamnya sangat beragam, terdapat penduduk asli atau pendatang, berpenghidupan dengan mengeksploitasi sumber daya alam atau jasa lingkungan, relatif sejahtera atau masih tertinggal (Harlen, 2014).

Salah satu alasan mengapa pengelolaan wilayah pesisir segera harus dimaksimalkan adalah kondisi letak geografis yang strategis, laut merupakan sarana yang di sediakan oleh alam yang menghubungkan semua wilayah daratan yang ada di dunia ini, hal ini tentu bisa dimanfaatkan untuk transportasi baik untuk bepergian maupun pengangkutan barang. Guna menunjang kebermanfaatan wilayah pesisir, sebaiknya pemerintah pusat atau daerah bisa melengkapi dan memperbaiki infrastruktur wilayah pesisir seperti pembangunan pelabuhan dan sarana penunjang lainnya hal ini bisa memaksimalkan sektor perdagangan. Selain memiliki letak yang strategis wilayah pesisir juga memiliki potensi lainnya yaitu hasil laut yang bisa di jadikan komoditas unggulan wilayah pesisir.

Tabel 1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Wilayah Riau Pesisir, Tahun 2015–2019

No	Kabupaten/ Kota	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Indragiri Hilir	37.923,47	39.697,57	41.506,52	42.995,13	44.791,85
2	Pelalawan	29.774,30	30.654,22	31.910,60	33.106,60	34.397,14
3	Siak	51.379,30	51.557,22	52.048,83	52.615,04	53.410,04
4	Bengkalis	82.676,67	80.577,99	79.201,93	77.921,53	76.422,87
5	Rokan Hilir	44.676,81	45.556,00	46.279,80	46.224,85	46.462,79
6	Kepulauan Meranti	11.096,27	11.451,08	11.831,48	12.306,27	12.633,55
7	Dumai	20.541,69	21.391,57	22.347,51	23.416,94	24.860,69

Sumber: Riau Dalam Angka 2010.

Secara teoritis, kabupaten yang terdapat di wilayah Riau Pesisir seharusnya mendapatkan nilai tambah yang banyak. Hal ini dikarenakan posisi yang sangat strategis yang di miliki oleh wilayah Riau Pesisir yang berhadapan

langsung dengan negara tetangga dan juga selat malaka yang merupakan jalur lintas perdagangan internasional.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Sektor apa saja yang menjadi sektor ekonomi unggulan di wilayah pesisir Provinsi Riau? 2) Bagaimana pola perubahan dan pertumbuhan struktur ekonomi di wilayah pesisir Provinsi Riau selama 5 tahun (2015-2019)?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis peran sektor basis dalam perekonomian di wilayah pesisir di Propinsi Riau. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pola perubahan dan pertumbuhan struktur ekonomi di wilayah pesisir di Propinsi Riau selama 5 tahun (2015-2019).

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Basis

Sederhananya teori ekonomi basis ini memberikan daerah kesempatan untuk mengeksplor sumberdaya yang dimiliki dan menjadikan komoditas unggulan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Selain itu, hal ini juga bisa mengurangi angka pengangguran di sekitar wilayah tersebut. Teori ini biasanya menggunakan data PDRB untuk mengidentifikasi dan menentukan kategori potensial. Apabila kategori potensial tersebut dikembangkan dengan baik akan mempengaruhi pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah secara optimal (BPS Kepri, 2016).

Untuk menganalisis basis ekonomi suatu wilayah teknik yang digunakan adalah Kuosien lokasi (**Location Quotient = LQ**). LQ digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor basis atau unggulan (*leading sector*).

Pembangunan Daerah

Menurut Arsyad (dalam Rizani, 2017) secara tradisional pembangunan memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada Gross Domestik Produk (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Untuk daerah, makna pembangunan yang tradisional difokuskan pada PDRB suatu provinsi, kabupaten dan kota. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Tolok ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor.

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Syahputra (2015) pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator yang penting dalam menganalisis pembangunan ekonomi yang dilaksanakan. Pertumbuhan harus berjalan secara berdampingan dan terencana dalam upaya terciptanya pemerataan kesempatan dan pembagian hasil hasil pembangunan. Dengan demikian maka suatu daerah yang kurang produktif akan menjadi lebih produktif dan berkembang yang pada

akhirnya dapat mempercepat proses pertumbuhan itu sendiri..

Potensi Daerah

Untuk mengetahui potensi ekonomi suatu daerah berdasarkan sektor maka dihitung bagaimana dan seberapa besar sumbangan masing-masing sektor tersebut terhadap PDRB dan kemampuan masing masing sektor tersebut dalam menyerap tenaga kerja. Sektor yang mampu memberikan sumbangan terbesar dan sekaligus juga sebagai sektor yang dapat melakukan penyerapan tenaga kerja tertinggi, akan menjadi potensi ekonomi unggulan (ekonomi basis) daerah tersebut (Meyes, Maulida dan Indrawati, 2010)..

Produk Regional Domestik Bruto

Untuk mengukur keberhasilan suatu pembangunan ekonomi daerah terdapat beberapa indikator yang lazim digunakan sebagai alat ukur. Indikator yang lazim digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bisa menjadi petunjuk kinerja perekonomian secara umum sebagai ukuran kemajuan suatu daerah (Sjafrizal, 2018). Selanjutnya Mairisa (2017) berpendapat bahwa keberhasilan pertumbuhan PDRB, tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan keuangan sebagai sumber pembiayaan yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Sektor Unggulan

Sektor unggulan perekonomian adalah sektor yang memiliki ketangguhan dan kemampuan tinggi sehingga dapat dijadikan sebagai tumpuan harapan pembangunan ekonomi. Selanjutnya Budhi (2019) juga mengatakan sektor unggulan umumnya dicerminkan oleh sektor basis yang dimiliki oleh setiap kabupaten/kota dimana sektor tersebut memiliki peranan ekspor sehingga tidak ada keterbatasan permintaan dan dapat

terus dikembangkan. Sektor basis dapat dijadikan andalan dalam pengembangan wilayah, sehingga dapat dipilih sektor unggulan dari sektor basis yang ada di setiap kabupaten/kota. Sektor unggulan ini, diharapkan mampu meningkatkan perekonomian dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten yang terdapat wilayah Riau Pesisir di. Kabupaten kabupaten tersebut yaitu, Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Pemilihan lokasi atau daerah penelitian ini dilakukan setelah melihat kondisi dan letak geografis Provinsi Riau yang berbatasan antara daratan dan lautan.

Jenis Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk time series. Data yang di butuhkan adalah data PDRB Provinsi Riau, PDRB Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten kepulauan Meranti dari tahun 2015– 2019. Data data pendukung lainnya diambil dari buku, artikel, jurnal dan lain lain.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam menganalisis peranan sektor basis dalam perekonomian wilayah Riau Pesisir yaitu analisis *Location Question* dan untuk menganalisis pola perubahan dan pertumbuhan struktur sektor ekonomi di wilayah Riau Pesisir

analisis yang digunakan adalah analisis *Shift Share*.

Analisis Location Question

Location Question atau disingkat menjadi LQ adalah suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu ektor/industry di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor/industry tersebut secara nasional (Tarigan, 2007). Selanjutnya, Tarigan juga berpendapat jika menggunakan LQ sebagai petunjuk adanya keunggulan komparatif dapat sektor sektor yang telah lama berkembang, sedangkan bagi sektor yang baru atau sedang tumbuh apalagi yang selama ini belum pernah ada, LQ tidak dapat digunakan karena produk totalnya belum menggambarkan kapasitas riil daerah tersebut. Adalah lebih tepat untuk melihat secara langsung apakah komoditi itu memiliki prospek untuk dieskpor atau tidak, dengan catatan terhadap produk tersebut tidak diberikan subsidi atau bantuan khusus oleh daerah yang bersangkutan melebihi yang diberikan daerah daerah lainnya.

Menurut Sjafrizal (2018) terdapat tiga jenis data yang dapat digunakan untuk menghitung koefisien yaitu,

1. Nilai tambah (*value added*) dari masing masing sektor atau subsektor sebagai mana terdapat dalam buku statistik PDRB menurut lapangan usaha yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
2. Nilai produksi barang dan jasa yang dapat dihitung dengan jalan mengalikan data jumlah produksi yang tercatat pada dinas dan instansi pemerintahan daerah dengan harga barang dan jasa bersangkutan.
3. Jumlah orang yang bekerja pada masing masing sektor, subsektor atau pada setiap komoditi bersangkutan

Formula LQ dengan menggunakan variabel kontribusi PDRB persektor (Tarigan, 2007) dengan Formulasi :

$$LQ = \frac{E_i^R / E^R}{E_i^N / E^N}$$

Dimana :

E_i^R = Jumlah kontribusi PDRB pada sektor i di daerah R.

E^R = Jumlah kontribusi PDRB di daerah R

E_i^N = Jumlah kontribusi PDRB pada sektor i di daerah referensi N

E^N = Jumlah kontribusi PDRB di daerah referensi N

Jika $LQ > 1$, maka daerah tersebut relatif terspesialisasi secara berlebihan (*overspecialised*) pada aktifitas ekonomi (sektor) yang bersangkutan.

Jika $LQ = 1$, maka daerah tersebut tidak terspesialisasi secara berlebihan ataupun kurang terspesialisasi pada aktifitas ekonomi yang dimaksud.

Jika $LQ < 1$, maka daerah tersebut relatif kurang terspesialisasi pada aktifitas ekonomi yang dimaksud.

Analisis *Shift Share*

Secara sederhana, analisis shift share bisa digunakan untuk mencari pola perubahan dan pertumbuhan struktur ekonomi di masing masing sektor dalam perekonomian di suatu daerah. Selanjutnya, analisis *shift share* akan menggambarkan kinerja sektor sektor dalam PDRB. Analisis ini membandingkan laju pertumbuhan sektor-sektor ekonomi regional (kabupaten/kota) dengan laju pertumbuhan perekonomian yang lebih tinggi tingkatannya (Provinsi). Menurut Sjafrizal (2018) Analisis *shift Share* bertujuan untuk melakukan pembuktian

empirik tentang ketiga faktor penentu terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, adapun tiga faktor tersebut sebagai berikut

1. Regional Share (*National Component*)

Merupakan komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh faktor luar, yaitu peningkatan kegiatan ekonomi daerah akibat kebijaksanaan nasional yang berlaku pada seluruh daerah.

2. Proportionality *Shift Share* (*Mixed Share*)

Komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh struktur atau potensi ekonomi daerah yang baik, yaitu berspesialisasi pada sektor yang pertumbuhannya cepat seperti sektor industri.

3. *Differential Shift* (*Competitive Shift*)

Komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang muncul karena kondisi spesifik daerah yang bersifat kompetitif. Unsur pertumbuhan inilah yang merupakan keunggulan kompetitif daerah yang dapat mendorong pertumbuhan ekspor daerah yang bersangkutan.

Dengan menggunakan notasi aljabar, berbagai hubungan antara komponen-komponen diatas dapat dinyatakan pada uraian berikut ini. Akan tetapi, sebelum mengemukakan rumus hubungan, terlebih dahulu akan dikemukakan notasi yang dipergunakan berikut ini: (Tarigan, 2007).

Δ = Pertambahan angka akhir (tahun t) dikurangi dengan angka awal (tahun t-n).

N = *National* atau wilayah analisis nasional/wilayah yang lebih tinggi jenjangnya (Provinsi Riau)

r = *Region* atau wilayah analisis (Kabupaten yang berada di pesisir Propinsi Riau)

E = PDRB/Banyaknya lapangan kerja.

i = sektor ekonomi ke- i

t = Tahun akhir

$t-n$ = Tahun awal

Ns = *National share*

Ps = *Proportional share*

Ds = *Differential shift*

Untuk mengetahui pertambahan PDRB selama periode analisis terhadap seluruh wilayah analisis dapat diperinci atas pengaruh dari *National share*, *Proportional share*, dan *Differential shift* dalam notasi aljabar sebagai berikut:

$$\Delta E_{r,i,t} = (Ns_i + Ps_{r,i} + Ds_{r,i})$$

$$\Delta E_r = (Ns + Ps_r + Ds_r)$$

Peranan *National share* (NS) adalah seandainya pertambahan PDRB/lapangan kerja regional sektor i tersebut sama dengan proporsi pertambahan PDRB/lapangan kerja nasional rata-rata. Hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Ns_{i,t} = E_{r,i,t-n} (E_{N,t} / E_{N,t-n}) - E_{r,i,t-n}$$

$$Ns_t = \sum_{r=0}^n \{ E_{r,i,t-n} (E_{N,t} / E_{N,t-n}) - E_{r,i,t-n} \}$$

Proportional Share ($Ps_{r,i}$) adalah melihat pengaruh sektor i secara nasional terhadap pertumbuhan PDRB/lapangan kerja sektor i pada region yang dianalisis. Hal ini dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Ps_{r,i,t} = \{ (E_{N,i,t} / E_{N,i,t-n}) - (E_{N,t} / E_{N,t-n}) \} \times E_{r,i,t-n}$$

$$Ps_{r,t} = \sum_{r=0}^n [\{ (E_{N,i,t} / E_{N,i,t-n}) - (E_{N,t} / E_{N,t-n}) \} \times E_{r,i,t-n}]$$

Differential shift ($Ds_{r,i}$) menggambarkan penyimpangan antara pertumbuhan sektor i di wilayah analisis terhadap pertumbuhan sektor i secara nasional. Hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Ds_{r,i,t} = \{ E_{r,i,t} - (E_{N,i,t} / E_{N,i,t-n}) E_{r,i,t-n} \}$$

$$Ds_{r,t} = \sum_{r=0}^n [\{ E_{r,i,t} - (E_{N,i,t} / E_{N,i,t-n}) E_{r,i,t-n} \}]$$

Untuk mengetahui profil perekonomian wilayah berdasarkan hasil perhitungan *shift share*, kita dapat menggunakan kombinasi atau total komponen shift, yaitu *proportional shift component* (Ps) dan *differential shift component* (Ds). Metode ini disebut dengan pergeseran bersih (PB)/net shift, dengan menjumlahkan keduanya akan dapat membagi kriteria wilayah sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan kemajuan ekonomi serta implikasi kebijakan yang harus dilaksanakan apabila $P + D > 0$, maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan sektor ke- i di kabupaten dan kota yang berada di wilayah pesisir Propinsi Riau termasuk dalam kelompok progresif (maju).

Dengan melihat besaran Ps dan Ds , maka suatu daerah/sektor dapat juga dikategorikan menjadi enam kelompok klasifikasi beserta implikasi kebijakannya. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel Kelompok Shift Share, Kriteria Klasifikasi dan Implikasi Kebijakan.

Grup	Pangsa Total	Keadaan	Interpretasi
1	Positif	PS (+) & DS (+)	Pertumbuhan wilayah lebih cepat berbanding rata-rata nasional dengan komposisi industri dan faktor lokal menyediakan keunggulan. Tidak ada indikasi kebijakan regional
2	Positif	PS (+) > DS (-)	Pertumbuhan wilayah lebih cepat berbanding rata-rata nasional karena satu komposisi favorit dari nilai tambah menyeimbangkan ketidakfavoritan faktor-faktor lokal. Kebijakan regional dapat difokuskan terhadap perbaikan prasarana lokal.
3	Positif	DS (+) > PS (-)	Pertumbuhan wilayah lebih cepat berbanding rata-rata nasional dengan faktor lokal menyeimbangkan ketidakfavoritan campuran industri. Kebijakan regional akan difokuskan terhadap pengembangan industri industri yang tumbuh untuk mengimbangi konsentrasi industri industri tersebut yang juga statis atau dalam penurunan.
4	Negatif	DS (+) < PS (-)	Pertumbuhan wilayah lebih lambat berbanding rata-rata nasional, dikarenakan campuran industri yang tidak favorit

			namun diimbangi oleh keunggulan faktor-faktor lokal. Kebijakan regional akan difokuskan terhadap pengembangan industri-industri yang tumbuh untuk mengimbangi konsentrasi industri-industri tersebut yang juga statis atau dalam penurunan.
5	Negatif	PS (+) < DS (-)	Pertumbuhan wilayah lebih lambat berbanding nasional karena faktor-faktor lokal yang tidak unggul namun diimbangi oleh campuran industri yang favorit. Kebijakan regional dapat difokuskan terhadap perbaikan prasarana lokal.
6	Negatif	PS (-) & DS (-)	Pertumbuhan wilayah lebih lambat berbanding rata-rata nasional dengan faktor-faktor lokal dan campuran industri yang tidak unggul. Potensi kecil. Memerlukan pengembangan industri-industri yang tumbuh dan produktif dan prasarana sosial.

Sumber: Mitchell, W., J. Myers dan J. Juniper, 2005 (dalam Tampubolon, 2007).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Location Quotient (LQ)

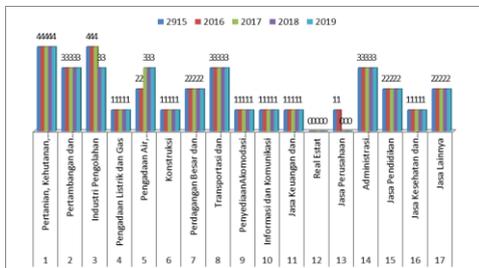
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada daerah yang termasuk di wilayah Riau pesisir, dapat diketahui bahwa di setiap masing-masing kabupaten dan kota yang berada di wilayah Riau Pesisir memiliki jumlah dan sektor basis yang berbeda. Seperti yang terlihat dalam gambar 1, bahwa dalam periode penelitian ini tiap tahunnya Kota Dumai menjadi daerah yang memiliki sektor basis di wilayah Riau Pesisir dengan sebanyak 1 sektor yaitu sektor Industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyedia akomodasi and makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, danSementara itu kabupaten

Indragiri Hilir memiliki 6 sektor basis yang mendorong pertumbuhan perekonomian pada daerah tersebut, adapun sektor perekonomian yang menjadi sektor basis di Kabupaten Indragiri Hilir adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pengadaaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor perdagangan besar dan eceran, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial dan jasa pendidikan.

Sementara itu Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hilir mempunyai 2 sektor basis yang mendorong perekonomian daerah tersebut. Selanjutnya Kabupaten Siak dari tahun 2015 sampai tahun 2017 memiliki 6 sektor basis, namun di 2 tahun periode terakhir, sektor basis di kabupaten siak mengalami penurunan, sektor yang mengalami perlambatan pertumbuhan adalah sektor jasa perusahaan yang memiliki nilai $LQ < 1$ yaitu 0,99. Untuk Kabupaten Kepulauan Meranti di 3 tahun pertama periode penelitian memiliki 4 sektor basis yang mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah tersebut, akan tetapi di 2 tahun terakhir periode penelitian sektor industri pengolahan mengalami perlambatan yang memiliki koefisien nilai 0,97 dan 0.97.

Berbeda dengan daerah lain yang berada di wilayah riau pesisir yang memiliki minimal 2 sektor basis untuk menopang perekonomian daerah masing masing, Kabupaten Bengkalis hanya memiliki 1 sektor basis yaitu sektor pertambangan dan penggalian. Dengan kata lain sektor menggerakkan perekonomian daerah tersebut:

Gambar 1 Jumlah Sektor Basis Dengan Pendekatan LQ Menurut Kabupaten dan Kota Yang Berada di Wilayah Riau Pesisir Tahun 2015-2019

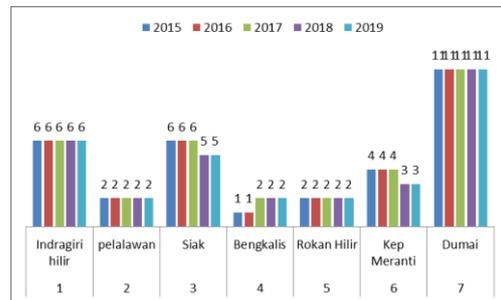


Sumber: Data Olahan, 2020

Berdasarkan gambar 1 dapat diketahui sektor apa saja yang menjadi sektor basis yang dominan di wilayah Riau Pesisir, ada pun sektor basis yang dominan di masing masing daerah di wilayah riau peisir yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor transportasi dan pergudangan dan sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib.

Secara keseluruhan peranan sektor basis di masing masing kabupaten dan kota yang berada di wilayah Riau Pesisir memiliki peranan yang berbeda beda sesuai kuantitas sektor basis yang dimiliki oleh daerah tersebut dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Kota Dumai yang memiliki sektor basis yang paling banyak memiliki pertumbuhan ekonomi paling tinggi jika dibandingkan dengan daerah lainya di wilayah Riau Pesisir.

Gambar 2 Perkembangan Indeks LQ Menurut Sektor Perekonomian Yang Berada di Wilayah Riau Pesisir Tahun 2015- 2019



Sumber: Data Olahan, 2020

1. Analisis Shift Share

Sederhananya analisis *shift share* adalah suatu teknik yang digunakan untuk melihat dan menganalisis perubahan struktur (sektor) suatu daerah. Untuk tujuan tersebut, analisis ini menggunakan tiga informasi dasar yang berhubungan satu sama lain yaitu (Prawira dan Hamidi,2013) :

1. *National share component* (NS) adalah banyaknya pertambahan PDRB/lapangan kerja regional seandainya proporsi perubahannya sama dengan laju pertumbuhan nasional selama periode studi. Hal ini dapat dipakai sebagai kriteria bagi daerah yang bersangkutan untuk mengukur apakah daerah itu tumbuh lebih cepat atau lebih lambat dari pertumbuhan nasional rata-rata.
2. *Proportional shift component* (PS) dikenal juga sebagai komponen struktural atau *industrial mix*, adalah untuk mengukur besarnya *shift regional netto* yang diakibatkan oleh komposisi sektor-sektor industri di daerah yang bersangkutan. Komponen ini positif di daerah-daerah yang berspesialisasi dalam sektor- sektor yang secara nasional tumbuh cepat dan negatif di

daerah- daerah yang berspesialisasi dalam sektor- sektor yang secara nasional tumbuh dengan lambat atau bahkan sedang merosot.

3. *Differential shift component* (DS) terkadang juga dinamakan komponen lokasional atau regional. Komponen ini mengukur besarnya *shift regional netto* yang diakibatkan oleh sektor- sektor industri tertentu yang tumbuh lebih cepat atau lebih lambat di daerah yang bersangkutan daripada tingkat nasional yang disebabkan oleh faktor- faktor lokasional intern. Jadi suatu daerah yang mempunyai keuntungan lokasional seperti sumberdaya yang melimpah/efisien, akan mempunyai *differential shift component* yang positif, komponen yang negatif.

Dari hasil perhitungan *shift share* yang telah dilakukan di daerah yang berada di wilayah Riau Pesisir yang telah di rekapitulasi dan dapat di lihat dalam tabel 5.30 sebagai berikut:

Tabel 3 Rekapitulasi Hasil Perhitungan *Shift Share* Kabupaten dan Kota di Wilayah Riau Pesisir Tahun 2015-2019 (milyar rupiah).

No	Daerah	National Share	Propositional Shift	Differential Shift	Shift Netto
1	Indragiri Hilir	3.957.452,75	3.622.116,87	711.203,23	2.910.913,64
2	Pelalawan	3.107,05	2.603,82	-1.088,04	1.515,78
3	Siak	5.361,61	-1.073,72	-2.257,12	-3.330,85
4	Bengkalis	8.241.888,82	14.887.241,76	5.826,58	14.881.415,18
5	Rokan Hilir	4.662,18	-3.060,14	183,93	-2.8762
6	Kepulauan Meranti	1.157,93	357,18	20,13	377,32
7	Kota Dumai	2.143.600,71	2.170.046,07	5.352,11	2.175.398,18

Sumber: *Data Olahan, 2020*

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa dalam komponen national share semua kabupaten dan kota yang berada di wilayah Riau Pesisir

memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi pada daerah masing masing, selain itu dapat diambil kesimpulan lainnya bahwa kinerja perekonomian di tiap tiap kabupaten dan kota yang berada di wilayah Riau Pesisir juga dipengaruhi oleh kinerja perekonomian di tingkat daerah atas yaitu Provinsi Riau dan hal tersebut membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi pada kabupaten dan kota tersebut.

Selanjutnya, untuk komponen *Proportional Shift* di tiap tiap daerah kabupaten dan kota yang berada di daerah wilayah Riau Pesisir memiliki nilai berbeda satu sama lainnya, hal ini terlihat dalam tabel 5.31 yang menunjukkan bahwa ada 3 kabupeten yang nilai *proportional shift* nya memberikan nilai negatif yaitu Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir. Hal ini menandakan bahwa pengaruh efek dari komposisi industri terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut tidak terlalu berdampak kepada struktur ekonomi di tiap tiap daerah. Lainnya halnya dengan daerah lain seperti Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kota Dumai yang memiliki nilai *proportional shift* nya positif, hal ini menunjukkan bahwa komposisi industri dan daerah ini cukup memiliki keunggulan spesialisasi dan komposisi tersebut tumbuh lebih cepat dari pada komposisi industri yang berada di tingkat Povinsi Riau, selain itu hal tersebut juga memberikan efek positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

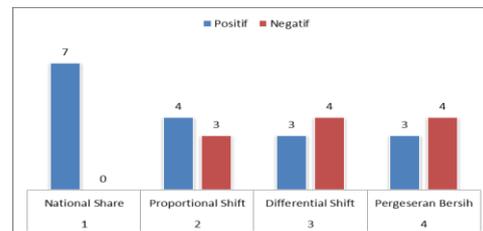
Pengaruh *differential shift* di masing masing daerah juga memilki nilai yang berbeda beda, dalam tabel 5.31 dapat dilihat bahwa Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak mempunyai

nilai negatif hal ini menunjukkan bahwa daya saing dan kemandirian daerah yang ada di kabupaten ini masih sangat rendah, dengan kata lain hal ini juga menunjukkan secara keseluruhan di daerah tersebut tumbuh lebih lambat daripada daerah di tingkat Provinsi Riau. Sementara itu, secara agregat masing masing kabupaten dan kota yang berada di wilayah Riau Pesisir juga memiliki nilai yang berbeda satu sama lainnya. Seperti yang terlihat dalam tabel 5.31 ada 3 kabupaten yang memiliki nilai yang negatif di pergeseran bersih yakni Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hillir hal ini menandakan bahwa secara umum pertumbuhan ekonomi daerah tersebut melamban.

Hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah agar mampu menstimulus sektor sektor ekonomi daerah yang untuk tumbuh dan berkembang sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah masing masing, selain itu untuk Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kota Dumai memiliki nilai pergeseran bersih yang positif. Dari tujuh kabupaten dan kota yang berada di wilayah Riau pesisir hanya Kota Dumai yang menunjukkan trend positif dari setiap komposisi yaitu *national share*, *proportional shift*, *differential shift* dan pergeseran bersih. Sementara itu Kabupaten Siak yang memiliki trend negatif terbanyak yang terdiri dari komposisi *proportional shift*, *differential shift* dan pergeseran bersih. Untuk lebih jelas terkait perbandingan antar komponen share dapat dilihat gambar 5.3 sebagai berikut.

Gambar 3 Perbandingan Antar

Komponen Share di Wilayah Riau Pesisir Tahun 2015-2019



Sumber: Data Olahan, 2020

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang dilakukan dari bab 1 sampai bab 5, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil Analisis *Location Question* di Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan ada enam sektor yang di kategorikan sektor basis yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor transportasi dan pergudangan, sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial dan jaminan sosial wajib dan sektor jasa pendidikan. Untuk hasil penelitian *Location Question* di Kabupaten Pelalawan menunjukkan bahwa ada 2 sektor yang digolongkan menjadi sektor basis yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan sektor industri pengolahan. Kabupaten Siak di tahun 2015-2017 memiliki enam sektor basis namun di tahun 2018-2019 sektor jasa perusahaan tidak dapat digolongkan menjadi sektor basis karena nilai $LQ < 1$. Sementara itu Kabupaten Bengkalis memiliki 2 sektor basis yaitu sektor pertambangan dan penggalian dan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang.

Selanjutnya Kabupaten Rokan Hilir Memiliki dua sektor yang potensial yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan sektor pertambangan dan penggalian. Selanjutnya, untuk hasil LQ di Kabupaten Kepulauan Meranti sektor yang dikategorikan sektor basis adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor transportasi dan pergudangan dan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Sementara itu, Kota Dumai merupakan daerah yang memiliki sektor basis yang paling banyak jika dibandingkan dengan daerah lainnya di wilayah Riau Pesisir yakni sebelas sektor.

2. Berdasarkan hasil analisis *shift share* bahwa untuk kontribusi PDRB daerah pada masing masing di wilayah Riau Pesisir memiliki komponen dan jumlah yang berbeda beda. Untuk hasil penelitian *shift share* Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan struktur perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir bergeser dari sektor primer menuju sektor sekunder dan sektor tersier, meskipun tingkat pergeserannya relative kecil dari tahun ke tahun. Untuk hasil perhitungan Shift Share di Kabupaten Pelalawan menunjukkan bahwa struktur perekonomian di Kabupaten Pelalawan bergeser dari sektor primer menuju sektor sekunder, sementara itu nilai pergeseran bersih secara agregat menunjukkan bahwa Kabupaten Pelalawan termasuk ke dalam daerah yang progresif. Selanjutnya hasil Shift Share di Kabupaten Siak setiap komponen industri menunjukkan efek negatif yang

berarti bahwa setiap sektor primer dan sektor sekundern belum maksimal dalam memberikan kontribusi dalam perekonomian di Kabupaten Siak. Sementara itu Kabupaten Siak memiliki nilai pergeseran bersih bahwa Kabupaten Siak digolongkan ke dalam daerah yang *unprogresif*. Hasil perhitungan *Shift Share* pada Kabupaten Bengkalis menunjukkan bahwa struktur perekonomian di kabupaten ini di dominasi oleh sektor primer, sementara itu pergeseran bersih menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkalis di golongan ke dalam daerah yang pertumbuhan lamban. Selanjutnya hasil perhitungan *Shift Share* di Kabupaten Rokan Hilir masih menggantungkan perekonomiannya pada sektor primer, selanjutnya nilai pergeseran bersih menunjukkan bahwa Kabupaten Rokan Hilir digolongkan ke dalam daerah *unprogresif*. Untuk hasil perhitungan *Shift Share* di Kabupaten Kepulauan Meranti menunjukkan bahwa sektor primer dan sektor sekunder sama sama mempengaruhi struktur perekonomian di Kabupaten Kepulauan Meranti dan berdasarkan nilai pergeseran bersih Kabupaten Kepulauan Meranti di golongan ke daerah yang pertumbuhannya *progresif*. Selanjutnya hasil perhitungan *Shift Share* Pada Kota Dumai menunjukkan bahwa pengaruh sektor sekunder lebih besar jika dibandingkan dengan pengaruh sektor primer terhadap pembentukan PDRB di Kota Dumai. Sementara itu nilai pergeseran bersih menunjukkan bahwa Kota Dumai termasuk ke dalam daerah yang progresif.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan saran-saran yang kiranya perlu diperhatikan, yaitu :

1. Untuk mempercepat pembangunan daerah pada di wilayah Riau Pesisir, masing masing pemerintah daerah diharapkan untuk mengoptimalkan dan menangkap peluang potensi sumber daya peisir.yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Riau Pesisir.
2. Pemerintah masing masing daeerah di wilayah Riau Pesisir harus segera memberikan solusi atas ketergantungan daerah kepada sektor primer, meskipun sudah ada sebagian daerah sudah bergeser kepada sektor sekunder namun belum optimal. Hal ini dikarenakan wilayah pesisir merupakan wilayah yang memilki sumber daya yang besar sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat dibandingkan dengan wilayah daratan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau. (2016). Analisis Sektor Unggulan Propinsi Kepulauan Riau. Batam.
- Budhi, I. m. (2019). Analisis Sektor Unggulan dan Potensi Pertumbuhan Ekonomi Di KabupatenBadung Taghun 2012-2016. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Unud*.
- Hajeri. (2015). Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian di Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*.
- Harlen. (2014). *Pemetaan Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Wilayah Riau Pesisir Dan Wilayah Riau Daratan Provinsi Riau*. Pekanbaru: Lembaga Penelitian Universitas Riau.
- Mairisa. (2017). Analisis Ketimpangan Wilayah Berdasarkan PDRB dan PAD Antara Riau Daratan dan Riau Pesisir. *Jom FEKON* .
- Mayes Anthoni, Yusni Maulida. Toti Indrawati. (2010). Analisis Sektor Unggulan Dengan Pendekatan Location Quation Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Ekonomi Vol. 18 No. 04*.
- Rizani, A. (2017). Analisis potensi Ekonomi di Sektor dan Subsektor Pertanian, Kehutanan dan kabupaten Jember. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.15, No. 2.
- Sjafrizal. (2018). *Analisis Ekonomi Regional dan Penerapannya Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Syahputra, H. A. (2015). Analisis Sektor Unggulan dan Perubahan Struktur Perekonomian Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Unsiah*